

**DAFTAR BACAAN**

**A. BUKU**

- Aisyah, Nur, *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Deepublish, Yogyakarta, 2012.
- Azheri, Busyra, *Prinsip Pengelolaan Mineral dan Batubara (Kajian Filosofis terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Bendar, Amin, *Hukum Penanaman Modal Asing: Implementasi untuk Pertambangan di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2018.
- Haris, Oheo Kaimuddin, *Tindak Pidana di bidang Pertambangan*, Media Sahabat Cendekia, Surabaya, 2019.
- Hasiman, Ferdy, *Freeport : Bisnis Orang Kuat vs Kedaulatan Negara*, Kompas Media Nusantara, Jakarta 2019.
- Hayati, Tri, *Era Baru Hukum Pertambangan di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara (edisi revisi), cetakan ke-15*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2018.
- HS, Salim, *Hukum Kontrak Teori&Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Jened, Rahmi, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2007
- \_\_\_\_\_, *Teori dan Kebijakan Hukum Investasi Langsung (Direct Investment)*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Khaleed, Badriya, *Mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016.
- Leith, Denise, *The Political of Power: Freeport in Suharto's Indonesia*, University of Hawai's Press, Honolulu, 2003.
- Munawaroh, Siti dan Sugiono, *Hukum Investasi*, Jakad Publishing Surabaya, Surabaya, 2019.

- Poeradisastra, Ratih dan Bambang Haryanto, *Soetaryo Sigit: Membangun Pertambangan Untuk Kemakmuran Indonesia*, KPG, Jakarta, 2016.
- Rais, Mohammad Amien, *Agenda Mendesak Selamatkan Indonesia*, PPSK Press, Yogyakarta, 2008.
- Redi, Ahmad, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Layanan Publik*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2012.
- Saleng, Abrar, *Hukum Pertambangan*, UII Presss, Yogyakarta, 2004.
- Soehoed, AR., *Sejarah Pengembangan Pertambangan PT. FI di Provinsi Papua (jilid I) Membangun Tambang di Ujung Dunia*, Aksara Karunia, Jakarta, 2005.
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), cetakan ketiga puluh sembilan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- Supramono, Gatot, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Trihastuti, Nanik, *Hukum Kontrak Karya : Pola Kerjasama Pengusahaan Pertambangan di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2013.

## **B. MAKALAH DAN ARTIKEL**

- Ahmad Redi, *Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, Nomor 2, Juni 2015.
- Abrar Saleng, *Hubungan Hukum Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Swasta Dalam Berbagai Pola Kontrak Kerjasama Pengusahaan Pertambangan*, *Jurnal Hukum* No. 13 Vol 7. April 2000.
- Adelia Fauziah Rizqy, *Kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesi (BANI) Dalam Penyelesaian Sengketa Pelaksanaan Izin Pertambangan Mineral dan Batubara*, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2014.
- Agung Cahyono, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2011.
- Alfaris Renwair, *Dasar Kewenangan Dikeluarkan Izin Usaha Pertambangan Khusus Sementara Kepada PT. FI Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009*, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Ari Wahyudi Hertanto, *Kontrak Karya (Suatu Kajian Hukum Keperdataan)*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-38 No.2, April-Juni 2008.

- Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata Darma, *Udah Tepatkah Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menyikapi PT Freeport?*, Nomor : 013/Kementerian-Kajian-Dan-Strategi-Bem-Usd/Iii/2017.
- Daniel K. Sitorus, *Implikasi Terminasi Perjanjian Peningkatan Dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) Indonesia Dengan Negara Asing Terhadap Perlindungan Investasi Asing (Studi Kasus Terminasi Perjanjian P4m Indonesia Dan Belanda)*, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, 2017, h. 6. Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>, tanggal 2 Juli 2019.
- Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, SK No. 057/OT/I/200760, perihal : Pengesahan Beberapa Persetujuan P4M, Lampiran IV a Peraturan Kepala BKPM : Daftar Perjanjian Peningkatan Perlindungan Penanaman Modal (*Investment Guarantee Agreement*) Indonesia dengan Negara Lain.
- Hartati, Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, *Jurnal : MMH* Jilid 41 No. 4, Oktober 2012.
- Kementerian ESDM, *Freeport : Mitos atau Realitas Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Bahan Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tanggal 8 Agustus 2018.
- Parlementaria, *Freeport Harus Patuhi Undang-Undang*, Edisi 147 TH. XLVII 2017
- Pieter E. Latumeten, *Reposisi Pemberian Kuasa Dalam Konsep "Volmacht Dan Lastgeving" Berdasarkan Cita Hukum Pancasila*, *Jurnal Hukum Pembangunan*, Edisi Januari-Maret 2017.
- Roni Sulistyanto Luhukay, Tanggung Jawab PT. Freeport Indonesia Terhadap Penanganan Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan di Kabupaten Mimika, Papua, *Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 3/Maret/2016.
- Tempo, *Freeport Buat Siapa*, Edisi 12 Maret 2017.

### C. INTERNET

- Agus Triyono, dkk, *Karpet Merah Kontrak Karya Dari Rezim Orba*, <https://lipsus.kontan.co.id/v2/freeport/read/301/Karpet-merah-Kontrak-Karya-dari-rezim-Orba->, diakses pada tanggal 2 Mei 2020.
- BBC News Indonesia, *Pemerintah izinkan Freeport ekspor konsentrat*, [https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2014/07/140726\\_bisnis\\_freeport](https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2014/07/140726_bisnis_freeport), diakses pada tanggal 8 September 2018.
- Freeport McMoran, *History of Freeport McMoran Copper and Gold Inc.*, <https://www.fcx.com/about/history>, diakses pada tanggal 2 Mei 2020.
- Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Siaran Pers Nomor: 00115.Pers/04/Sji/2017 Tanggal: 29 Agustus 2017,

<https://www.esdm.go.id/Id/Media-Center/Arsip-Berita/Kesepakatan-Final-Perundingan-Antara-Pemerintah-Dan-Pt-Freeport-Indonesia>, Diakses Pada Tanggal 7 September 2018.

Lily Rusnah Fajariyah, Revisi Permen ESDM Perbolehkan Freeport Ekspor Konsentrat, <https://ekbis.sindonews.com/read/1196112/34/revisi-permen-esdm-perbolehkan-freeport-ekspor-konsentrat-1491888313>, diakses pada tanggal 20 September 2017.

Michael Agustinus, *Penjelasan Lengkap ESDM Soal Pemberian IUPK ke Freeport*, <https://finance.detik.com/energi/d-3466745/penjelasan-lengkap-esdm-soal-pemberian-iupk-ke-freeport>, diakses pada 8 September 2018.

Tengku Erwinsyahbana dan Vivi Lia Falini Tanjung, Kepastian Hukum Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia dalam Prespektif asas Hak Menguasai Negara, <http://www.researchgate.net/publication/326137954>, diakses pada tanggal 3 Mei 2018.

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/09/27/170856726/sah-pemerintah-ri-kuasai-51-persen-saham-freeport-indonesia>, diakses pada tanggal 5 Mei 2018.

<https://economy.okezone.com/amp/2018/09/05/320/1946205/pembangunan-smelter-freeport-di-bawah-target?page=2>, diakses pada tanggal 7 September 2018.

<https://www.ap3i.or.id/m/News/News-Update/IUPK-Sementara-freeport-Terus-Berlaku-Hingga-Proses-Divestasi-Terealisasi.html>, diakses pada tanggal 27 September 2018.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170406152624-85-205488/jonan-punya-dua-syarat-utama-agar-freeport-tetap-boleh-ekspor>, diakses pada tanggal 10 April 2017.

Hukum online.com, *ICSID: Medan Pertempuran Investor Asing dan Pemerintah*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20228/icsid-medan-pertempuran-investor-asing-dan-pemerintah/>, diakses pada tanggal 10 Mei 2019.

**DAFTAR TABEL**

	<b>Halaman</b>
<b>Tabel 1. Perbedaan Sistem Kontrak dengan Sistem Perizinan .....</b>	<b>37</b>
<b>Tabel 2. Perbedaan IUP dan IUPK Menurut UU No. 4/2009 .....</b>	<b>71</b>
<b>Tabel 3. Perbedaan Substansi yang diatur dalam Permen ESDM No. 15/2017, Permen ESDM No. 11/2018, dan Permen ESDM No. 51/2018 .....</b>	<b>74</b>
<b>Tabel 4. Perbedaan Antara Perubahan KK menjadi IUPK Operasi Produksi dengan Perpanjangan KK menjadi IUPK Operasi Produksi yang diatur dalam Permen ESDM No. 15/2017 jo. Permen ESDM No. 2018 jo. Permen ESDM No. 51/2018 .....</b>	<b>84</b>
<b>Tabel 5. Perbedaan antara IUPK Operasi Produksi sementara dengan IUPK Operasi Produksi definitif.....</b>	<b>87</b>